



Pembentukan KTB Jadi Kunci Penanggulangan Potensi Bencana

YOGYA, TRIBUN - Kota Yogyakarta memiliki sebuah garis imajiner atau sumbu filosofi yang menghubungkan Gunung Merapi dengan Laut Selatan. Keberadaan Kota Yogyakarta yang berada di antara gunung dan laut itu seolah menjadi pengingat, sejumlah potensi bencana di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun terus berupaya mengantisipasi potensi bencana alam di wilayahnya melalui berbagai cara. Satu di antaranya lewat penyusunan regulasi pembangunan dan rencana tata ruang wilayah yang sudah memperkirakan resiko bencana.

"Jadi ketika warga akan membangun harus ada persetujuan bangunan gedung (PBG), di mana di dalamnya menyampaikan ketahanan bangunan terhadap bencana, lengkap dengan jalur evakuasi, dan titik kumpul apabila terjadi bencana," ujar Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian Bappeda Kota Yogyakarta, Danang Yulisaksono, dalam podcast Obrolan Tugu Jogja bersama *Tribun Jogja*, Sabtu (20/7).

Danang menyebut, Pemkot Yogyakarta juga melakukan tiga langkah untuk mengantisipasi resiko bencana. Antara lain menyusun rencana pembangunna bencana (RPB), menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB), dan menyusun dokumen kontijensi.

Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga memiliki program kampung tangguh bencana (KTG) yang tersebar di 169 kampung di seluruh Kota Pelajar. Melalui KTB itu masyarakat dilatih untuk mengenali potensi bencana di wilayah masing-masing, melakukan mitigasi, dan antisipasi lewat simulasi bencana secara berkala.

"Tahun depan kami berencana mem-



TRIBUN JOGJA/DEWI RUKMINI

DIALOG - Ketua komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Ririk Banowati (kiri kedua), Anggota komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro (kanan kedua), dan Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian Bappeda Kota Yogyakarta, Danang Yulisaksono (kanan), saat berbincang dalam podcast Obrolan Tugu Jogja bersama *Tribun Jogja*, Sabtu (20/7).

buat semacam forum KTB. Tujuannya untuk evaluasi dan menyatukan semua KTB termasuk seluruh komunitas relawan, agar jadi satu kerangka siap menanggulangi bencana," tutur dia.

Menurut Danang, dalam memitigasi potensi bencana kendala terbesar yang sering ditemui adalah tingkat *awareness* (kesadaran) masyarakat masih tergolong rendah. Terutama kesadaran untuk mengingat bahwa ada potensi bencana yang mengintai, meski kejadian bencana itu sendiri jarang terjadi dan tidak diketahui kapan datangnya.

Ketua komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Ririk Banowati, menyampaikan selain membentuk Perda (peraturan daerah) penanggulangan bencana, pihaknya juga menyusun penganggaran serta pengawasan kegiatan.

Dikatakan pembentukan KTB pun tak

luput dari persetujuan para dewan wakil rakyat. Mengingat, setiap pembentukan KTB sejak 2013 sampai 2024 ini, selalu diikuti simulasi bencana dan hibah sarana prasarana (sarpras) berupa 10 macam alat penanggulangan bencana, semisal gergaji mesin, kendaraan roda tiga, serta jenset.

"Anggarannya cukup besar karena tiap KTB diberikan sarpras. Terakhir kami menepati anggaran sekitar Rp2 miliar lebih di Perubahan 2024 untuk pemberian peralatan bagi pembentukan 15 KTB, rencana akan diberikan akhir 2024," tutur Ririk.

Anggota komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, menilai warga Kota Yogyakarta sudah siap melakukan penanganan bencana. Hal itu terbukti dengan terbentuknya KTB di 169 kampung se-Kota Yogyakarta. (dm/ord)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005